

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

***The Sanction Paradox: Economic Statecraft and International Relations* oleh Daniel Drezner (1999).** Drezner menggunakan teori *game theory* dan conflict expectations untuk mengembangkan model yang menjelaskan perilaku negara-negara. Model tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang mengantisipasi konflik di masa depan lebih cenderung untuk memberlakukan sanksi. Hal ini karena mereka cenderung mempertimbangkan manfaat relatif dan reputasi dalam pengambilan keputusan mereka, dibandingkan dengan negara-negara yang tidak mengantisipasi konflik.

Drezner menguji modelnya melalui penelitian kuantitatif dan studi kasus dengan menggunakan data dari berbagai negara untuk menunjukkan bahwa hasil dari sanksi ekonomi selaras dengan prediksi modelnya. Salah satunya upaya Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir Korea Selatan pada tahun 1975 dan upaya untuk menghentikan program nuklir Korea Utara pada tahun 1994. Dalam kasus Korea Utara, Drezner menunjukkan bahwa Amerika Serikat menggunakan pendekatan yang berbeda, karena mereka mengantisipasi konflik di masa depan. Amerika Serikat menggunakan pengaruh ekonomi untuk mencegah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir.

Drezner menunjukkan bahwa keputusan untuk memberlakukan sanksi atau menggunakan pengaruh ekonomi sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang potensi konflik di masa depan. Temuan ini relevan dalam konteks kebijakan luar negeri saat ini, di mana negara-negara sering kali harus menyeimbangkan antara menegakkan sanksi dan mempertahankan hubungan diplomatik. Dalam kasus Korea Utara, pendekatan yang lebih halus dan strategis mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa memicu ketegangan yang lebih besar (Drezner, 1999).

Upaya Peluncutan Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016 – 2019 oleh Mohammad Jody Kusuma & Sylvia Octa Putri (2021). Jurnal ini menganalisis upaya Amerika Serikat dalam denuklirisasi Korea Utara melalui kebijakan "*Maximum Pressure and Engagement*," dan menemukan

beberapa temuan penting. Secara utama, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi, meskipun berhasil menekan ekonomi Korea Utara, tidak mampu menghentikan program nuklirnya, di mana rezim Kim Jong Un justru meningkatkan pengembangan senjata sebagai respons terhadap tekanan tersebut. Isu krisis kepercayaan antara kedua negara menjadi penghalang signifikan dalam diplomasi, di mana setiap pihak merasa terancam oleh tindakan satu sama lain. Teori Security Dilemma menjadi kerangka penting untuk menjelaskan dinamika ini, menggarisbawahi bagaimana tindakan defensif dapat dianggap sebagai ancaman. Selain itu, penekanan pada jaminan keamanan yang lebih konkret dari AS dinilai krusial untuk mencapai keberhasilan denuklirisasi. Jurnal ini juga mencatat bahwa jika kedua belah pihak dapat bertransformasi untuk memahami kepentingan dan motivasi satu sama lain, ada kesempatan untuk menciptakan dialog yang lebih produktif dan berkelanjutan (Kusuma & Putri, 2020).

***Hard Target: Sanctions, Inducements, and the Case of North Korea* oleh S. Haggard & M. Noland (2016).** Penulis menganalisis ekonomi politik yang kritis terhadap Korea Utara, terutama dalam kaitannya dengan upaya pengembangan nuklirnya dan kemampuan berbagai sanksi ekonomi serta kebijakan pelibatan. Para penulis berpendapat bahwa Korea Utara adalah “*hard target*” klasik karena memiliki rezim otoriter dengan koalisi kecil yang berkuasa yang sangat bergantung pada militer dan aparat keamanan. Pengaturan ini mengurangi kemampuan sanksi dan imbalan ekonomi karena rezim tersebut memiliki kemampuan untuk membebankan biaya kepada penduduknya tanpa risiko reaksi politik domestik yang besar. Makalah ini menyoroti bahwa, terlepas dari penerapan sanksi multilateral, perdagangan Korea Utara, terutama dengan China, tidak berhenti tumbuh, sehingga mengindikasikan bahwa sanksi tersebut hanya berdampak minimal pada keterlibatan ekonominya. Para penulis juga menyoroti perlunya memahami hubungan ekonomi eksternal Korea Utara, yang telah berorientasi kembali ke China dan beralih dari negara-negara yang cenderung menerapkan sanksi. Artikel ini juga melihat konsekuensi kemanusiaan dari bantuan, mengamati bahwa meskipun Korea Utara secara historis bergantung pada bantuan eksternal, perilaku rezim yang bermasalah telah mengakibatkan penurunan bantuan kemanusiaan (Haggard & Marcus, 2021).

***Are smart sanctions smart enough? An inquiry into when leaders oppress civilians under UN targeted sanctions* oleh Jiyoung Park & Hyun Jin Choi (2020).** Artikel ini membahas mengenai hubungan yang kompleks antara sanksi cerdas yang diberlakukan PBB dan kondisi hak asasi manusia di negara-negara target, terutama berfokus pada mengapa beberapa sanksi menyebabkan kerusakan tambahan bagi warga sipil, sementara yang lain tidak. Penulis berpendapat bahwa cakupan dan efektivitas sanksi cerdas, bersama dengan institusi politik di negara-negara target, merupakan faktor penting yang menentukan dampak buruk terhadap hak asasi manusia. Mereka mengajukan tiga hipotesis utama: (1) sanksi yang lebih luas lebih mungkin membahayakan hak asasi manusia; (2) sanksi yang lebih efektif mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia; dan (3) rezim otoriter dengan koalisi kecil yang menang lebih mungkin menindas warga sipil ketika dihadapkan dengan sanksi. Sanksi yang lebih komprehensif berdampak pada meningkatnya pelanggaran HAM, terutama pada rezim otoriter, karena para pemimpin menjadi terancam dan cenderung memaksa rakyatnya untuk tetap berkuasa. Sebaliknya, sanksi yang terfokus dan efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Selain itu, lembaga-lembaga politik yang dicirikan oleh koalisi kecil yang menang, melalui penelitian ini, ditemukan menghadapi kerentanan yang lebih besar terhadap penindasan ketika mereka dihadapkan pada sanksi karena para pemimpin lebih cenderung menghukum calon pesaing (Park & Choi, 2022).

***North Korea: Sanctions, Engagement and Strategic Reorientation* oleh Marcus Noland (2019).** Noland membahas peran sanksi dan insentif dalam menyelesaikan masalah Korea Utara, dengan fokus pada dinamika antara tekanan internasional dan perubahan kebijakan internal. Noland menemukan bahwa narasi "tekanan maksimum" yang mengklaim bahwa sanksi ekonomi secara signifikan memaksa Korea Utara untuk bernegosiasi tidak didukung oleh bukti yang kuat. Sebaliknya, ada indikasi bahwa rezim Korea Utara menyadari potensi dampak transformasional dari integrasi ekonomi lintas batas dan telah berusaha untuk mengendalikan proses tersebut agar tidak mengancam stabilitas politiknya. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya perencanaan yang sadar oleh mitra Korea Utara untuk memaksimalkan dampak transformasional dari keterlibatan ekonomi. Selain

itu, Noland mengusulkan bahwa tanpa komitmen politik yang lebih besar terhadap norma-norma internasional, keterlibatan dapat berisiko memperkuat doktrin Korea Utara tentang pengembangan paralel antara ekonomi dan program senjata. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih strategis dan terencana diperlukan untuk mendorong perubahan positif di Korea Utara, dan bahwa sanksi saja tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas hubungan internasional dengan Korea Utara dan tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mendorong reformasi (Noland, 2019).

Rational vs. Behavioural Approach to DPRK's Sanctions Problem oleh Irina Korgun and Liudmila Zakharova (2022). Penulis berpendapat bahwa negara-negara bertindak demi kepentingan pribadi mereka untuk memaksimalkan utilitas dan meminimalkan kerugian, gagal untuk menjelaskan pengejaran Korea Utara yang terus-menerus mengejar ambisi militernya meskipun ada sanksi ekonomi yang berat. Sebaliknya, mereka menganjurkan pendekatan perilaku yang menggabungkan faktor psikologis seperti penghindaran kerugian dan efek endowment, yang secara signifikan memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam lingkungan berisiko tinggi.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan negara-negara lain belum mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk memaksa Korea Utara meninggalkan program nuklirnya. Penulis menyoroti bahwa alih-alih menyerah di bawah tekanan ekonomi, Korea Utara telah menunjukkan ketangguhan dan bahkan meningkatkan kemampuan militernya, sebagaimana dibuktikan dengan uji coba rudal baru-baru ini. Paradoks ini dijelaskan melalui *behavioral economics lens* atau lensa ekonomi perilaku, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Korea Utara mungkin menganggap biaya untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya lebih besar daripada manfaat potensial dari bantuan ekonomi (Korgun & Zakharova, 2022).

When Do Imposed Economic Sanctions Work? A Critical Review of the Sanctions Effectiveness Literature oleh Dursun Peksen (2019). Dursun Peksen mengkaji efektivitas sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri, menyoroti peningkatan ketergantungan negara-negara Barat, terutama AS, pada sanksi dalam menghadapi krisis internasional. Ia mengidentifikasi kondisi yang meningkatkan

kemungkinan keberhasilan sanksi, seperti kerja sama multilateral, sifat rezim target, dan biaya ekonomi yang dikenakan. Peksen mengkritik literatur yang ada karena bias dalam interpretasi efektivitas sanksi dan ketergantungan pada data statis.

Temuan pentingnya adalah sanksi lebih efektif jika bersifat multilateral dan didukung lembaga internasional, serta lebih berhasil terhadap rezim demokratis yang menghadapi tekanan domestik. Ia juga menekankan dampak sanksi yang lebih terasa ketika mempengaruhi kelompok ekonomi dan politik kuat di negara target. Peksen berargumen bahwa efektivitas sanksi sering dilebih-lebihkan, terutama ketika menyebabkan konsekuensi negatif seperti represi atau krisis kemanusiaan. Dalam konteks Korea Utara, Peksen menunjukkan keterbatasan sanksi, di mana meskipun menghadapi sanksi ekstensif, rezim tersebut tetap melanjutkan program nuklir dan kebijakan represif. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam mencapai perubahan perilaku melalui sanksi. Artikel ini menyerukan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas sanksi dan implikasi luasnya di luar tujuan langsung (Peksen, 2019).

TINJAUAN LITERATUR

No	Literatur	Penulis	Tema Sentral	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	<i>The Sanction Paradox: Economic Statecraft and International Relations</i>	Daniel Drezner (1999)	Ekonomi Politik Internasional	Drezner menggunakan teori game theory dan conflict expectations dengan model coercion game untuk mengembangkan model yang menjelaskan perilaku negara-negara. Model ini menunjukkan bahwa negara pengirim lebih cenderung untuk menggunakan sanksi terhadap musuh, dan negara penerima lebih cenderung untuk membuat konsesi terhadap sekutu, sanksi ekonomi lebih efektif terhadap musuh, dan negara-negara yang mengantisipasi konflik di masa depan cenderung untuk membuat konsesi yang lebih kecil (Drezner, 1999).	Membahas sanksi ekonomi dalam konteks hubungan internasional	Tidak menerapkan teori pada kasus Korea Utara
2	<i>Sanctions for Nuclear Inhibition: Comparing Sanction Conditions between Iran and North Korea</i>	Inwook Kim, Jung-Chul Lee (2019)	Ekonomi Politik Internasional	Mengusulkan model sekuensial yang mengonseptualisasikan tiga fase berbeda yang dengannya sanksi memaksa pembatalan nuklir. Model tersebut dimulai dengan fase penerapan penderitaan ekonomi, diikuti oleh konversinya menjadi tekanan koersif politik, dan diakhiri dengan penciptaan (atau kegagalannya) zona kesepakatan yang memungkinkan (ZOPA). (I. Kim & Lee, 2019)	Membahas keefektifan sanksi Korea Utara	Tidak membahas kebijakan AS
3	<i>The Effectiveness of UNSC Sanctions: The Case of North Korea</i>	Victoria Kim (2017)	Ekonomi Politik Internasional	Menggunakan perspektif liberalisme, yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Berpendapat bahwa pendekatan yang lebih baik daripada sanksi	Membahas efektifitas sanksi PBB dalam proliferasi nuklir	Menggunakan perspektif liberalisme

				adalah normalisasi hubungan antara Korea Utara dan komunitas internasional, dimulai dengan perjanjian damai dan tawaran bantuan ekonomi serta jaminan keamanan kepada rezim di Pyongyang (V. Kim, 2017).		
4	<i>Researching a Hard Target: Analyzing North Korea with Official Economic Data</i>	Stephan Haggard & Liuya Zhang (2020)	Ekonomi Politik Internasional	Memiliki data statistik ekonomi Korea Utara, ekspor impor pangan, minyak dan perdagangan lainnya terutama dengan China dan Rusia (Haggard & Zhang, 2020).	Membahas hubungan Korea Utara dengan China dan Rusia	Tidak spesifik membahas sanksi internasional
5	<i>Relationship between Economic Sanctions and Militarized Conflict Focusing on Reciprocal Causation</i>	Hyung Min Kim. (2008)	Security Studies	Sanksi ekonomi dapat menyebabkan konflik militer dan sebaliknya. Keterlibatan sanksi ekonomi secara signifikan meningkatkan kemungkinan konflik militer, dengan data yang menunjukkan peningkatan substansial dalam probabilitas konflik ketika sanksi diberlakukan. Provokasi militer Korea Utara telah menyebabkan peningkatan sanksi dari komunitas internasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketegangan lebih lanjut (H. M. Kim, 2020).	Membahas sanksi yang dijatuhkan pada Korea Utara	Memabahas timbal balik hubungan militer terhadap sanksi ekonomi
6	<i>North Korea, Nuclear Weapons, and the Stability-Instability Paradox</i>	Terence Roehrig (2016)	Security Studies	Sebagian besar perilaku Korea Utara dapat ditafsirkan sebagai sikap pencegahan daripada agresi langsung yang bertujuan untuk mengubah status quo. Provokasi militer Korea Utara, seperti serangan siber dan uji coba rudal, tidak serta merta mengindikasikan peningkatan toleransi risiko yang signifikan, tetapi lebih mencerminkan pendekatan strategis untuk	Membahas ketahanan rezim senjata nuklir	Tidak membahas spesifik sanksi AS

				menjaga keamanan rezimnya (Roehrig, 2016).		
7	<i>Are smart sanctions smart enough? An inquiry into when leaders oppress civilians under UN targeted sanctions</i>	Jiyoun Park & Hyun Jin Choi (2020)	Ekonomi Politik Internasional	Tiga hipotesis utama: (1) sanksi yang lebih luas lebih mungkin membahayakan hak asasi manusia; (2) sanksi yang lebih efektif mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia; dan (3) rezim otoriter dengan koalisi kecil yang menang lebih mungkin menindas warga sipil ketika dihadapkan dengan sanksi. Sanksi dengan cakupan yang lebih luas dan kurang efektif cenderung memperburuk kondisi hak asasi manusia, terutama di rezim otoriter. Sebaliknya, ketika sanksi ditargetkan secara sempit dan efektif, sanksi tersebut tidak membahayakan warga sipil yang tidak bersalah dan bahkan dapat meningkatkan kondisi hak asasi manusia (Park & Choi, 2022).	Membahas sanksi yang dijatuhkan oleh sebuah negara di bawah PBB	Membahas hak asasi manusia lebih luas
8	<i>Economic Sanctions RECONSIDERED</i>	Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, Barbara Oegg (2007)	Ekonomi Politik Internasional	Sanksi lebih mungkin berhasil ketika sanksi tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang mencakup kerja sama internasional dan ketika negara pengirim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap target. Biaya pembangkangan bagi target harus lebih besar daripada biaya kepatuhan yang dirasakan agar sanksi menjadi efektif. Variabel-variabel politik yang memengaruhi keberhasilan sanksi, seperti sifat hubungan sebelumnya antara negara pengirim dan negara target, stabilitas politik rezim target, dan adanya kebijakan pendamping (Hufbauer et al., 2007).	Membahas negara yang mendapatkan sanksi ekonomi	Tidak membahas spesifik paradoks sanksi

9	<i>Economic Sanctions and The Sanctions Paradox: A Post-Sample Validation of Daniel Drezner's Conflict Expectations Model</i>	Hillebrand, Evan and Bervoets, Jeremy (2013)	Ekonomi Politik Internasional	Menggunakan Model Ekspektasi Konflik (<i>Conflict Expectations Model</i>) Drezner pada kasus Rusia terhadap negara bekas Uni Soviet. Penurunan efektivitas sanksi disebabkan oleh peningkatan upaya negara-negara NIS untuk mendiversifikasi hubungan ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada Rusia, sebuah pergeseran strategis (Hillebrand & Bervoets, 2013).	Menggunakan model ekspektasi konflik Drezner	Membahas pada kasus rusia lebih speifik
10	<i>North Korea: Sanctions, Engagement and Strategic Reorientation</i>	Marcus Noland (2019)	Ekonomi Politik Internasional	Korea Utara sangat menyadari potensi efek destabilisasi dari integrasi ekonomi lintas batas. Rezim ini telah menyusun keterlibatannya dengan mitra eksternal untuk mengurangi dampak transformatif yang dapat mengancam kontrolnya (Noland, 2019).	Membahas kebijakan maximum pressure and engagement	Tidak membahas paradoks sanksi
11	<i>Rational vs. Behavioural Approach to DPRK's Sanctions Problem</i>	Irina Korgun and Liudmila Zakharova (2022)	Ekonomi Politik Internasional	Model agen rasional tradisional, yang mengasumsikan bahwa negara-negara bertindak demi kepentingan pribadi mereka untuk memaksimalkan utilitas dan meminimalkan kerugian, gagal untuk menjelaskan pengejaran Korea Utara yang terus-menerus mengejar ambisi militernya meskipun ada sanksi ekonomi yang berat. Dijelaskan melalui behavioral economics lens atau lensa ekonomi perilaku, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Korea Utara mungkin menganggap biaya untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya lebih besar daripada manfaat potensial dari bantuan ekonomi (Korgun & Zakharova, 2022).	Membahas kepentingan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir	Menggunakan perspektif behavioral economic lens

12	<i>Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice</i>	Daniel W. Drezner (2017)	Kebijakan Luar Negeri	Drezner menggunakan model inovasi kebijakan Kingdon, yang mencakup pengenalan masalah, perumusan alternatif kebijakan, dan insentif politik dari para pemangku kepentingan utama, untuk menjelaskan bagaimana sanksi yang cerdas dapat diterima di arena kebijakan luar negeri. Sanksi yang ditargetkan dapat secara tidak sengaja memperkuat kekuatan rezim tersebut dengan memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya kepada pendukung setia sambil meminimalkan dampak pada populasi yang lebih luas (Drezner, 2011).	Membahas bagaimana sanksi beralasan dan diterapkan	Tidak membahas spesifik Korea Utara
13	<i>When Do Imposed Economic Sanctions Work? A Critical Review of the Sanctions Effectiveness Literature</i>	Dursun Peksen (2019)	Kebijakan Luar Negeri	Ketergantungan yang semakin besar pada sanksi oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam menangani krisis internasional. Mengacu pada berbagai kerangka teori, termasuk model tawar-menawar dan pendekatan pilihan publik, untuk menganalisis kondisi-kondisi di mana sanksi-sanksi tersebut berhasil atau gagal (Peksen, 2019).	Membahas efektivitas sanksi ekonomi	Tidak membahas paradoks sanksi
14	<i>Understanding economic sanctions: Interdisciplinary perspectives on theory and evidence</i>	Gabriel Felbermayr, T. Clifton Morgan, Constantinos Syropoulos, Yoto V. Yotov (2021)	Kebijakan Luar Negeri	Sanksi sering dianggap tidak efektif, dengan ilmuwan politik memperkirakan bahwa sanksi hanya mencapai tujuan yang dinyatakan sekitar 30% dari waktu. Kerangka teori yang dibahas dalam tulisan ini mencakup teori tawar-menawar dan diplomasi koersif, yang secara tradisional telah diterapkan untuk memahami proses sanksi (Felbermayr et al., 2021).	Membahas efektivitas sanksi ekonomi	Menggunakan teori diplomasi koersif

15	<i>The EU's "Sanction Paradox"</i>	Clara Portela (2007)	Ekonomi Politik Internasional	Komponen utama sanksi UE, termasuk larangan visa, pembekuan aset, embargo senjata, dan sanksi ekonomi selektif. Kerangka teoritis mencakup konsep kekuatan normatif dan peran hubungan internasional dalam membentuk kebijakan luar negeri UE (Portela, 2007).	Membahas paradoks sanksi	Menggunakan instrument aktor yang berbeda
16	Upaya Peluncutan Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016 - 2019	Mohammad Jody Kusuma, Sylvia Octa Putri (2021)	Kebijakan luar negeri	Menggunakan kebijakan Maximum Pressure and Engagement untuk melakukan peluncutan senjata nuklir Korea Utara. Dalam kebijakan tersebut terdapat upaya pressure berupa ancaman, sanksi dan provokasi militer dan juga upaya engagement yang terdiri dari perundingan antara Amerika Serikat dan Korea Utara (Kusuma & Putri, 2020).	Membahas kebijakan sanksi AS terhadap Korea Utara	Tidak membahas paradoks sanksi
17	<i>Hard Target: Sanctions, Inducements, and the Case of North Korea</i>	Haggard, Stephan and Noland, Marcus (2016)	Keamanan Internasional	Membahas efektivitas sanksi ekonomi dan insentif dalam konteks program senjata nuklir dan rudal Korea Utara. Membahas juga dilema bantuan kemanusiaan, dinamika perundingan nuklir, serta tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi Korea Utara dalam lingkungan global. Dengan menggunakan survei terhadap bisnis China dan Korea Selatan yang beroperasi di Korea Utara, buku ini memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana strategi ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan dan stabilitas negara tersebut (Haggard & Marcus, 2021).	Membahas efektivitas sanksi terhadap Korea Utara	Tidak membahas sanksi AS
18	RESPON AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN	Geno Vybra Yoga, Bima Jon Nanda, Sofia Trisni	Keamanan Internasional	AS melakukan strategi deterrence terhadap Korea Utara terkait pengembangan program nuklir miliknya melalui beberapa tindakan	Membahas kebijakan luar negeri AS	Tidak membahas paradoks sanksi

	PRESIDEN DONALD TRUMP TERHADAP PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA	(2020)		seperti pemberlakuan sanksi ekonomi, penguatan sektor pertahanan bersama negara aliansi Korea Selatan dan Jepang dengan melakukan reformasi aliansi kerja sama pertahanan serta pemasangan sistem pertahanan THAAD di Korea Selatan, dan perundingan melalui KTT Singapura tahun 2018 dan KTT Vietnam tahun 2019 (Yoga et al., 2020).		
19	<i>The juche H-bomb? North Korea, nuclear weapons and regime-state survival</i>	Edward Howell (2020)	Keamanan Internasional	Ideologi nuklir membuka jalur menarik untuk penyelidikan di masa depan mengenai apakah negara lain peduli tentang bagaimana Korea Utara menyajikan kebijakan luar negerinya kepada audiens domestik, terlepas dari apakah keberlangsungan hidupnya dibingkai dalam nada ideologis atau sekitar kemampuan penangkalan senjata nuklir. Pertanyaan ini sangat relevan terkait dengan Korea Utara, di mana ambisi nuklir rezim tersebut mewakili salah satu dari banyak kekhawatiran mendesak bagi komunitas internasional berkaitan dengan DPRK, terutama pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok. (Howell, 2020)	Membahas ideologi sebagai regime state survival	Tidak membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat
20	<i>North Korean nuclear capabilities, 2018</i>	Hans M. Kristensen & Robert S. Norris (2018)	Keamanan Internasional	Korea Utara mungkin telah memproduksi cukup bahan fisil untuk membangun antara 30 hingga 60 senjata nuklir, dan mungkin saja telah merakit 10 hingga 20. Meskipun Korea Utara dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan kendaraan kembali yang berfungsi secara operasional untuk mengantarkan hulu ledak nuklir yang operasional, ada beberapa	Membahas kapasitas senjata nuklir Korea Utara	Tidak membahas sanksi internasional

				ketidakpastian mengenai apakah mereka telah berhasil membuktikan hal tersebut. Meskipun demikian, program senjata nuklir Korea Utara telah membuat kemajuan yang cukup signifikan selama bertahun-tahun, termasuk berbagai uji coba balistik dan nuklir yang kuat. Diperkirakan, jika itu belum terjadi, hanyalah masalah waktu sebelum kekuatan nuklir Pyongyang dapat dianggap sepenuhnya berfungsi. (Kristensen & Norris, 2018)		
21	STRATEGIC ENGAGEMENT AMERIKA SERIKAT – KOREA UTARA TERHADAP PELUNCURAN MISIL KOREA UTARA TAHUN 2017-2018	Rizky Aulia Pangestika (2022)	Kebijakan Luar Negeri	Pada periode 2017–2018, pendekatan diplomasi koersif yang diterapkan oleh Amerika Serikat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap Korea Utara dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Berbeda dengan strategi terdahulu, upaya ini disertai dengan pemberlakuan sanksi ekonomi yang secara spesifik menasar sumber-sumber pendanaan utama negara tersebut, sebagai bentuk tekanan agar Korea Utara bersedia mematuhi tuntutan denuklirisasi. Namun, tenggat waktu yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dianggap terlalu singkat, sehingga semakin menempatkan Korea Utara dalam posisi yang terdesak untuk segera memulai proses denuklirisasi. (Pangestika, 2022)	Membahas strategi engagement Donal Trump	Tidak membahas paradoks sanksi
22	<i>Nuclear Myths and Political Realities</i>	Kenneth N Waltz (1990)	International Political Theory	Senjata nuklir, alih-alih menjadi ancaman, justru dapat menciptakan stabilitas internasional melalui efek deterrence. Waltz menolak mitos umum bahwa proliferasi nuklir pasti berbahaya, dan	Membahas nuklir	Tidak spesifik membahas Korea Utara

				berargumen bahwa jika senjata ini berada di tangan aktor negara yang rasional, maka justru dapat mencegah terjadinya perang besar. Ia mengkritik kebijakan internasional yang sering dibentuk oleh ketakutan irasional dan bukan oleh analisis strategis, serta menekankan pentingnya memahami peran senjata nuklir secara realistis dalam politik global. (Waltz, 1990)		
23	<i>Getting Deterrence Right: The Case for Stratified Deterrence</i> <i>Getting Deterrence Right: The Case for Stratified Deterrence</i>	Brent J. Talbot (2020)	Military Strategy	Dunia saat ini telah menjadi salah satu dari "trilema keamanan." Tindakan yang diambil oleh satu negara untuk melindungi diri dari negara lain dapat, pada gilirannya, membuat negara ketiga merasa tidak aman. Ada kebutuhan besar akan keberagaman nuklir (senjata teater dan berdampak rendah) dan peningkatan kemampuan konvensional di angkatan deterensi AS untuk memberikan stabilitas strategis di dekade-dekade mendatang. (Talbot, 2020)	Membahas keamanan dan senjata nuklir	Tidak membahas sanksi ekonomi
24	<i>Maximum pressure – deferred engagement: why Trump's North Korea policy is unwise, dangerous, and bound to fail</i>	Markus B. Liegl (2018)	Kebijakan Luar Negeri	Berbeda dengan pendahulunya, Pemerintahan Trump berniat untuk menghadapi kemampuan nuklir Pyongyang yang semakin berkembang dengan cara yang lebih proaktif dan berdampak. Untuk mewujudkan kepentingan lama Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), Washington telah merancang strategi baru yang bertujuan untuk memaksa Pyongyang agar meninggalkan program nuklirnya dengan memaksimalkan	Membahas <i>maximum pressure</i>	Tidak membahas paradoks sanksi

				tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik terhadap DPRK. (Liegl, 2017)		
25	<i>Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of Alexander George</i>	Jack S. Levy (2008)	Security Studies	Strategi diplomasi koersif adalah instrumen pemerintahan yang sudah ada sejak lama yang belum pernah disistematisasi. Tujuannya adalah untuk mengartikulasikan teori kebijakan yang relevan dengan diplomasi koersif di mana ancaman, persuasi, insentif positif, dan akomodasi diintegrasikan ke dalam strategi tawar-menawar krisis yang memberikan pemimpin politik alternatif selain perang atau strategi militer koersif yang ketat. (Levy, 2008)	Membahas diplomasi koersif	Tidak menerapkan dalam kasus Korea Utara
26	<i>Bridging Deterrence and Compellence: An Alternative Approach to the Study of Coercive Diplomacy</i>	MARIA SPERANDEI (2006)	Security Studies	Deterrence dan Koersi umumnya dianggap sebagai dua bagian terpisah dari koin yang sama, dan penelitian cenderung bergerak dalam setiap bagian daripada antara keduanya. Pendekatan yang ada dapat dikelompokkan menjadi tiga perspektif utama yang mempertimbangkan pencegahan dan pemaksaan sebagai fenomena yang 'bersama tetapi berlawanan', 'terpisah dan tidak setara', atau 'kabur dan tidak dapat dibedakan'. (Sperandei, 2006)	Membahas diplomasi koersif	Tidak membahas kebijakan luar negeri AS
27	<i>The target strikes back: explaining countersanctions and Russia's strategy of differentiated retaliation</i>	Masha Hedberg (2018)	Ekonomi Politik Internasional	Strategi kontra-sanksi Rusia tidak hanya menerangi tujuan kebijakan yang dikejar oleh salah satu aktor utama dalam politik dunia, tetapi juga mulai mengatasi kekurangan yang sudah lama ada dalam literatur tentang sanksi. Literatur tentang sanksi cenderung berfokus pada negara "pengirim", yaitu pemerintah yang memulai	Membahas <i>counter-sanctions</i>	Tidak membahas kasus Korea Utara

				sanksi ekonomi. Pencarian jawaban untuk pertanyaan yang tampaknya sulit tentang efektivitas sanksi telah menghasilkan banyak studi tentang motif dan batasan pengirim. (Hedberg, 2018)		
28	<i>Countering Sanctions: The Unequal Geographic Impact of Economic Sanctions in North Korea</i>	YONG SUK LEE (2014)	Ekonomi Politik Internasional	Sanksi kemungkinan akan tidak efektif selama Korea Utara dapat mempertahankan kontrol terpusat yang kuat dan menekan ketidakpuasan yang muncul akibat meningkatnya ketidaksetaraan. Karena Korea Utara telah beradaptasi dengan sanksi dalam jangka waktu yang lama, sanksi tambahan mungkin hanya dianggap sebagai "ketidaknyamanan". Sanksi keuangan tampaknya menyebabkan lebih banyak ketidaknyamanan, tetapi tampaknya tidak mungkin sanksi dapat secara efektif mencegah proliferasi nuklir. (Lee, 2014)	Membahas adaptasi sanksi terhadap Korea Utara	Tidak membahas paradoks sanksi
29	<i>North Korea's Cyber Operation</i>	Jenny Jun, Scott LaFoy, Ethan Sohn (2015)	Security Studies	Korea Utara muncul sebagai aktor penting di dunia maya dengan organisasi rahasia dan militernya yang memperoleh kemampuan untuk melakukan operasi dunia maya. Namun, tidak ada literatur standar yang komprehensif tentang kemampuan dunia maya Korea Utara yang mengambil pandangan terpadu tentang topik tersebut. (Jun et al., 2016)	Membahas kasus cybercrime Korea Utara	Tidak membahas sanksi ekonomi AS
30	<i>North Korean Illicit Activities and Sanctions: A National Security Dilemma</i>	Bruce E. Bechtol Jr (2018)	Security Studies	Amerika Serikat telah mencoba beberapa inisiatif, mulai dari PSI hingga sanksi unilateral, tindakan Departemen Keuangan, dan bergabung dengan komunitas internasional untuk menerapkan sanksi PBB. Namun, banyak dari tindakan ini tidak	Membahas aktivitas ilegal Korea Utara	Tidak membahas paradoks sanksi

				menghasilkan hasil karena dua alasan kunci. Pertama, Amerika Serikat sering gagal untuk cukup menegakkan inisiatif yang dapat membatasi proliferasi Korea Utara, penjualan ilegal barang-barang, dan aktivitas perbankan ilegalnya. Selanjutnya, Korea Utara tidak 'bermain sesuai aturan' dalam sistem internasional sehingga sering kali dapat menghindari penegakan hukum. (Bechtol, 2018)		
--	--	--	--	--	--	--